

PRINSIP KERJA SAMA DALAM WACANA KOMUNIKASI KELUARGA JAWA DI KELURAHAN KEDIRI

Yerli Agilia Putri, Nurlaksana Eko Rusminto, Sumarti, Siti Samhati

Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung

Jalan Sumantri Brodjonegoro, Gedong Meneng, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

yerliagilia@gmail.com

ABSTRAK: Bahasa sebagai alat komunikasi selalu digunakan manusia dalam setiap aktivitas sosialnya. Dalam proses berkomunikasi tersebut, seseorang cenderung akan menghadapi kendala-kendala yang menyebabkan komunikasi tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan Untuk menghilangkan kendala dalam komunikasi tersebut, penutur dan mitra tutur dituntut untuk menyadari bahwa ada kaidah-kaidah kebahasaan yang harus ditaatinya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pematuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama dalam wacana komunikasi keluarga Jawa di Kelurahan Kediri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Data penelitian berwujud tuturan percakapan di lingkungan keluarga Jawa. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik simak-rekam-catat. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif menggunakan teknik interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam wacana komunikasi keluarga umumnya selalu mematuhi prinsip kerja sama. Pelanggaran terhadap prinsip kerja sama juga ditemukan dalam wacana komunikasi keluarga tapi tidak mendominasi. Pelanggaran terhadap prinsip kerja sama adakalanya dilakukan secara sengaja untuk mencapai tujuan-tujuan lain dalam konteks yang lebih luas.

KATA KUNCI: *pematuhan; pelanggaran; prinsip kerja sama; wacana komunikasi keluarga*

PRINCIPLES OF COOPERATION IN THE DISCUSSION OF JAVA FAMILY COMMUNICATIONS IN KELURAHAN KEDIRI

ABSTRACT: Language as a communication tool is always used by humans in every social activity. In the process of communicating, a person tends to face obstacles that cause communication to not work as expected. This study aims to describe the compliance and violation of the principle of cooperation in the discourse of Javanese family communication in Kediri Village. The method used in this research is a descriptive qualitative method. The research data is in the form of conversational speech in a Javanese family environment. The research data was collected through the watch-record-record technique. The collected data was then analyzed descriptively using interactive techniques. The results of the study indicate that in the discourse of family communication generally always adhere to the principle of cooperation. Violations of the cooperative principle are also found in family communication discourse but do not dominate. Violations of the cooperative principle are sometimes carried out intentionally to achieve other goals in a wider context.

KEYWORDS: *compliance; violation; the principle of cooperation; family communication discourse*

Diterima:
2022-03-11

Direvisi:
-

Distujui:
2022-04-03

Dipublikasi:
2022-10-30

Pustaka : Putri, Y., Rusminto, N., Sumarti, S., & Samhati, S. (2022). PRINSIP KERJA SAMA DALAM WACANA KOMUNIKASI KELUARGA JAWA DI KELURAHAN KEDIRI. Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 18(2), 108-117.
doi:<https://doi.org/10.25134/fon.v18i2.5720>

PENDAHULUAN

Bahasa sebagai alat komunikasi selalu digunakan manusia dalam setiap aktivitas sosialnya. Dalam proses berkomunikasi tersebut, seseorang cenderung akan menghadapi kendala-kendala yang

menyebabkan komunikasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan (Grice dalam Rusminto, 2015, hlm. 92). Untuk menghilangkan kendala dalam komunikasi tersebut, penutur dan mitra tutur dituntut untuk menyadari bahwa ada kaidah-

kaidah kebahasaan yang harus ditaatinya. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa peristiwa komunikasi merupakan aktivitas yang secara langsung di atur oleh norma-norma tertentu (Hymes dalam Cahaya, 2013, hlm. 124). Dalam kegiatan berkomunikasi, baik penutur maupun mitra tutur memiliki tanggung jawab penuh terhadap tindakan kebahasaan yang dilakukannya tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan Allan (Wijana & Rohmadi, 2018, hlm.) bahwa setiap peserta tutur memiliki tanggung jawab penuh terhadap tindakan dan penyimpangan kaidah kebahasaan di dalam interaksi lingualnya.

Dalam setiap kegiatan berkomunikasi selalu ada tujuan-tujuan yang akan dicapai. Penutur mengemukakan tuturan dengan tujuan mengomunikasikan suatu hal kepada mitra tuturnya. Tujuan tersebut tentunya baru dapat tercapai apabila mitra tutur dapat memahami tuturan yang disampaikan oleh penutur itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu adanya persamaan persepsi maupun interpretasi terhadap sesuatu topik yang dibicarakan. Lebih dari itu, tuturan yang relevan, jelas, dan mudah dipahami dari penutur juga sangat diperlukan sehingga mitra tutur dapat menangkap maksud tuturan yang disampaikan oleh penutur dengan benar (Winarsih, 2013; Wijana & Rohmadi, 2018). Tegasnya, untuk menciptakan pola komunikasi yang efektif diperlukan prinsip-prinsip kerja sama di dalamnya sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai secara maksimal.

Pematuhan prinsip kerja sama selayaknya dapat diimplementasikan dalam setiap interaksi komunikasi yang dilakukan, terlebih komunikasi yang dilakukan dalam ranah keluarga. Penerapan prinsip kerja sama dalam komunikasi keluarga tidak hanya dapat menciptakan komunikasi yang efektif, tetapi juga mampu memberikan efek lebih

jauh, yakni terciptanya keharmonisan dalam hubungan kekeluargaan. Sebaliknya, pengabaian terhadap prinsip-prinsip kerja sama dalam komunikasi, khususnya di lingkungan keluarga akan memiliki dampak negatif yang tidak kecil. Hal ini mengingat interaksi komunikasi memiliki norma-normanya sendiri (Hymes dalam Cahaya, 2013, hlm. 124) yang sejatinya harus ditaati oleh setiap peserta tutur. Pengabaian terhadap norma dapat menciptakan ketersinggungan, rasa tidak dihargai, bahkan sampai ke tingkatan penghinaan bagi mitra tuturnya. Pada akhirnya, keadaan tersebut akan menyebabkan hilangnya rasa empati, simpati, dan terlebih keharmonisan di antara anggota keluarga. Oleh karena itu, penerapan prinsip kerja sama dalam komunikasi, khususnya di lingkungan keluarga selayaknya perlu diterapkan secara maksimal.

Prinsip kerja sama merupakan seperangkat aturan percakapan yang dijadikan pedoman oleh peserta tutur agar dapat melakukan percakapan secara kooperatif, efektif, dan efisien (Herniti, 2015, hlm. 125). Sejalan dengan pendapat tersebut, Hidayati (2018, hlm. 252) mengungkapkan bahwa prinsip kerja sama mengharuskan peserta tutur untuk saling memiliki tujuan dalam menyampaikan dan menafsirkan makna dari sebuah ujaran yang dikeluarkan. Selain itu, peserta tutur harus saling bekerja sama agar komunikasi berjalan dengan efisien.

Prinsip kerja sama dalam komunikasi diperkenalkan pertama kali oleh Grice (Putrayasa, 2014; Rusminto, 2015, hlm. 92-93). Prinsip kerja sama tersebut berbunyi, *“Berikanlah sumbangan Anda pada percakapan sebagaimana yang diperlukan sesuai dengan tujuan atau arah pertukaran pembicaraan yang sedang Anda ikuti.”* Secara lebih rinci, prinsip kerja sama tersebut dituangkan Grice ke dalam empat maksim, yaitu (1) maksim kuantitas, (2)

maksim kualitas, (3) maksim relevansi, dan (4) maksim pelaksanaan. Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta tutur memberikan kontribusi yang secukupnya sesuai yang dibutuhkan oleh mitra tuturnya. Maksim kualitas mewajibkan peserta tutur memberikan informasi secara benar, yakni didasarkan pada bukti-bukti yang memadai. Maksim relevansi mengharuskan peserta tutur memberikan kontribusi yang sesuai dengan topik pembicaraan. Adapun maksim pelaksanaan menghendaki peserta tutur untuk berbicara secara langsung, teratur, jelas, dan ringkas.

Sesungguhnya penelitian tentang prinsip kerja sama dalam wacana komunikasi telah banyak dilakukan oleh para peneliti, mahasiswa, dan kelompok akademisi lainnya. Beberapa penelitian tersebut di antaranya pernah dilakukan oleh Devi & Qomaruddin (2017) yang mengkaji prinsip kerja sama dalam bahasa transaksi jual beli *online* di Tokopedia.com. Selanjutnya, penelitian tentang prinsip kerja sama juga dilakukan Arvianto (2019) yang mengkaji prinsip kerja sama dalam acara komedi *Extravaganza*. Penelitian relevan selanjutnya dilakukan oleh Sahara (2020) yang mengkaji prinsip kerja sama Grice pada percakapan film. Ketiga penelitian tersebut secara keseluruhan mengkaji pematuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama dalam wacana komunikasi. Adapun beberapa penelitian lainnya hanya mengkaji salah satu dari dua permasalahan utama yang sering menjadi fokus kajian dalam prinsip kerja sama. Penelitian yang dimaksud di antaranya seperti yang dilakukan Sari & Juita (2019) yang hanya mengkaji pematuhan prinsip kerja sama dan penelitian Sari & Alfiyani (2021) yang hanya mengkaji pelanggaran prinsip kerja sama pada komunikasi santri. Pengkajian terhadap salah satu fokus disesuaikan dengan temuan data di lapangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini difokuskan pada pematuhan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kerja sama dalam wacana komunikasi keluarga. Wacana komunikasi keluarga menjadi fokus penelitian karena dalam praktik komunikasi ditemukan tindak-tanduk komunikasi yang mematuhi dan sekaligus melanggar prinsip kerja sama. Prinsip kerja sama yang dimaksud meliputi empat maksim sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang suatu keadaan, gejala, individu, maupun kelompok tertentu yang dapat diamati (Moleong, 2014). Data penelitian berwujud tuturan percakapan berbahasa Jawa di lingkungan keluarga. Oleh karena penelitian ini mengkaji prinsip kerja sama dalam wacana komunikasi keluarga di Kelurahan Kediri, maka data penelitian dikumpulkan melalui teknik simak-rekam-catat (Mahsun dalam Nasucha, 2015). Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dan diinter-pretasikan secara deskriptif menggunakan teknik interaktif (Miles & Huberman dalam Sugiyono, 2016). Proses analisis dan interpretasi dilakukan untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai pematuhan dan pelanggaran terhadap prinsip kerja sama dalam wacana komunikasi keluarga di Kelurahan Kediri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada pematuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama dalam wacana komunikasi keluarga. Berdasarkan

pengamatan yang dilakukan terhadap beberapa keluarga di kelurahan Cahaya Mas, peneliti menemukan beberapa wujud komunikasi yang mematuhi dan melanggar prinsip kerja sama. Pematuhan dan pelanggaran prinsip kerja sama dalam komunikasi keluarga terjadi pada seluruh maksim, yakni maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan. Berikut ini akan dipaparkan bentuk-bentuk pematuhan dan pelanggaran terhadap prinsip kerja sama dalam wacana komunikasi keluarga.

Pematuhan Prinsip Kerja Sama dalam Wacana Komunikasi Keluarga

Pematuhan Maksim Kuantitas

Maksim kuantitas mengharuskan peserta tutur dapat memberikan informasi yang cukup dan informatif (Rahardi dalam Lestari, dkk, 2019). Pematuhan terhadap maksim kuantitas berarti bahwa tuturan harus memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam maksim kuantitas, yakni tuturan harus secukupnya atau sebanyak yang dibutuhkan mitra tutur sehingga informasi yang dikehendaki oleh mitra tutur dapat terpenuhi. Berikut ini disajikan contoh data wacana komunikasi keluarga yang mematuhi maksim kuantitas.

- (1) S: *Sampean opo ora sekolah?* 'Kamu apa tidak sekolah?'
R: Sekolah.
S: *La kok urung adus?* 'Kok belum mandi?'
R: *Ijek isuk kok.* 'Masih pagi kok.'

Tuturan pada data (1) di atas terjadi pada pagi hari ketika semua anggota keluarga bergegas untuk memulai kegiatannya. Percakapan yang terjadi antara S dan R mematuhi maksim kualitas karena R selalu memberikan jawaban yang tepat, cukup, dan informatif atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan S. Jawaban pertama hanya berupa jawaban

singkat yang ditandai dengan penanda lingual "*Sekolah*", sedangkan jawaban kedua berupa alasan yang cukup informatif dan memadai sehingga penutur, yakni S langsung dapat memahaminya dan segera bergegas pergi untuk melakukan kegiatan yang lain. Tak berbeda dengan data (1), wacana komunikasi yang terjadi antara seorang ayah dan anaknya pada data (2) berikut ini juga mematuhi prinsip kuantitas.

- (2) J: *Sampean songko ngendi, Le?* 'Kamu dari mana, Le?'
M: *Songko pondok.* 'Dari pondok'
J: *Kok balike mbengi timen?* 'Kok pulangny malam sekali.'
M: *Teng pondok enten kegiatan sholawatan.* 'Di pondok ada kegiatan selawatan.'

Pada data (2) di atas, peristiwa tutur terjadi pada malam hari ketika J baru saja pulang dari mengaji. M lalu mengajukan dua pertanyaan kepada J berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan selama di luar. Setiap pertanyaan yang diajukan J selalu dijawab oleh M dengan porsi yang cukup, tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh J sebagai penutur sekaligus penanya. Selain itu, jawaban yang disampaikan oleh M juga sangat informatif. Hal ini dibuktikan dari respon J yang bisa memaklumi mengapa J pulang larut malam.

Pematuhan Maksim Kualitas

Maksim kualitas menghendaki peserta tutur memberikan informasi sesuai dengan bukti-bukti nyata yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Fauziah, dkk, 2018, hlm. 52). Pematuhan terhadap maksim kualitas berarti bahwa tuturan harus memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam maksim kualitas, yakni informasi yang dituturkan harus didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Berikut

ini contoh data wacana komunikasi keluarga yang mematuhi maksim kualitas.

- (3) S: *La ngopo ora ngaji?* ‘Kenapa tidak (berangkat) mengaji?’
F: *Mbah Alem ijek nang Lampung.* ‘Mbah Alim masih di Lampung.’
S: *Karo sopo, Le?* ‘Dengan siapa, Le?’
F: *Karo Pak Udin.* ‘Dengan Pak Udin.’

Percakapan pada data (3) terjadi pada sore hari ketika anak-anak biasanya menyiapkan diri untuk mengaji di musala, masjid, atau pun pondok. Oleh karena F terlihat santai dan tidak bersiap-siap untuk mengaji, maka S selaku orang tua menanyakan kepada F mengenai alasannya bersantai. P kemudian memberikan jawaban bahwa ternyata gurunya sedang bepergian ke Lampung. Jawaban tersebut mengandung kebenaran yang mutlak karena didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa wacana percakapan pada data (3) mematuhi maksim kualitas. Wacana percakapan yang mengandung nilai kebenaran juga tampak pada data (4) berikut.

- (4) F: *Saiki bulan opo to, Mas?* ‘Sekarang bulan apa to, Mas?’
D: Bulan Februari.
F: *Enek tanggal abange ora?* ‘Ada tanggal merahnya tidak?’
D: *Eneng.* ‘Ada.’

Topik yang dibicarakan pada data (4) adalah seputar tanggal merah di bulan Februari. F bertanya kepada D tentang bulan dan keberadaan tanggal merah di dalamnya. Sebagai seorang kakak, D memberikan jawaban yang sesuai dan dapat dipercaya kebenarannya. D memberikan jawaban bahwa waktu itu memang sudah masuk bulan Februari dan di dalamnya terdapat beberapa tanggal

merah yang menunjukkan hari libur. Hal itu menunjukkan bahwa wacana komunikasi sebagaimana yang terlihat pada data (4) mematuhi maksim kualitas.

Pematuhan Maksim Relevansi

Maksim relevansi mewajibkan peserta tutur memberikan kontribusi yang sesuai dengan konteks atau topik pembicaraan (Hermaliza dalam Achsani, 2019; Citra & Fatmawati, 2021). Pematuhan terhadap maksim relevansi berarti bahwa tuturan harus memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam maksim relevansi, yakni pemberian informasi yang sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan dengan mitra tutur. Data (5) berikut ini merupakan contoh data wacana komunikasi keluarga yang mematuhi maksim relevansi.

- (5) H: *Mak, enek tamu kae lo!* ‘Bu, itu ada tamu!’
M: *Mamak isek masak. Bapakmu kae.* ‘Ibu masih masak. Bapakmu itu.’
H: *Pak, enek tamu!* ‘Pak, ada tamu!’
J: *Bapak bajuan disek.* ‘Bapak memakai baju dulu.’

Percakapan pada data (5) di atas terjadi antara seorang anak dengan ibunya. Sang anak, H yang mengetahui ada tamu datang langsung menghampiri ibunya, M dan memberitahukan kepadanya bahwa ada tamu datang. Tuturan pemberitahuan tersebut ditimpali oleh sang ibu dengan penanda lingual “*Mamak isek masak. Bapakmu kae.*” Jika ditinjau secara cermat, tuturan balasan dari sang ibu seperti tidak memiliki relevansi dengan pernyataan H sebelumnya. Namun, sesungguhnya tuturan balasan dari sang ibu mengandung implikatur bahwa dirinya sedang sibuk sehingga belum bisa menyambut tamu. Oleh karena itu, sang ibu mengarahkan anaknya, H untuk memanggil ayahnya. Harapannya agar

sang ayah berkenan menyambut tamu yang datang. Hal ini juga berarti bahwa tuturan (5) mematuhi maksim relevansi meskipun ditinjau dari struktur kebahasaan seolah tidak memiliki hubungan sama sekali.

Pematuhan Maksim Pelaksanaan

Pada maksim pelaksanaan, para peserta tutur diharuskan untuk berbicara secara langsung, teratur, jelas, dan ringkas (Grice dalam Rusminto, 2015: 93). Pematuhan terhadap maksim pelaksanaan berarti bahwa tuturan harus memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam maksim pelaksanaan, yakni pemberian informasi yang disampaikan secara langsung, tidak berbelit-belit, teratur, dan jelas. Berikut ini dikemukakan data yang mematuhi maksim pelaksanaan dalam prinsip kerja sama.

- (6) M: *Mak, iki mau kon tuku opo wae?*
'Bu, ini tadi disuruh beli apa saja?'
I: *Minyak goreng sekilo, lombok limangewu, obat karet sak bungkos.*
'Minyak goreng satu kilo, cabai lima ribu, obat karet satu bungkus.'
M: *Engko lak susok?* 'Nanti kalau ada uang kembaliannya?'
I: *Susuke enggonen jajan.* 'Uang kembaliannya buat beli jajan.'

Peristiwa tutur pada data (6) terjadi pada sore hari ketika M disuruh ibunya, I untuk membeli kebutuhan dapur dan obat karet. M bertanya kepada I untuk memperjelas hal-hal yang harus dibelinya. Selanjutnya, I memberikan jawaban yang tidak pendek, tetapi disampaikan secara langsung, jelas, dan teratur. Jawaban yang dimaksud pada data (6) ditandai dengan penanda lingual "*Minyak goreng sekilo, lombok limangewu, obat karet sak bungkos.*" Berdasarkan alasan tersebut, dapat dikemukakan bahwa komunikasi yang terjadi antara M dan I mematuhi

prinsip kerja sama yang berwujud maksim pelaksanaan.

Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam Wacana Komunikasi Keluarga

Pelanggaran Maksim Kuantitas

Pada bagian sebelumnya telah disinggung bahwa maksim kuantitas merupakan maksim yang menghendaki peserta tutur untuk memberikan informasi yang cukup dan informatif. Pelanggaran terhadap maksim kuantitas berarti bahwa tuturan tidak memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam maksim kuantitas, yakni tuturan cenderung dilebih-lebihkan dan tidak memadai sehingga dapat menyita waktu dari mitra tutur. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pendapat Rahardi (2010: 53) bahwa tuturan yang tidak mengandung informasi yang sungguh-sungguh diperlukan mitra tutur dapat dikatakan melanggar maksim kuantitas. Berikut ini disajikan contoh data wacana komunikasi keluarga yang melanggar maksim kuantitas.

- (7) R: *Sampean reti peciku, Mas?*
'Kamu tahu kopiah saya, Mas?'
D: *Ora reti. Paling didol mamak nang Mbah Sarijem.* 'Tidak tahu. Mungkin dijual Ibu di tempatnya Mbah Sarijem.'

Peristiwa tutur yang ditunjukkan pada data (7) di atas terjadi pada malam hari antara adik (R) dan kakak (D). Sang adik yang waktu itu lupa meletakkan kopiahnya bertanya kepada sang kakak. Rupanya sang kakak, D malah memberikan jawaban dengan nada mengomel. Hal ini dikarenakan sang adik sudah terlalu sering menanyakan perihal kopiahnya tersebut. Hampir setiap akan berangkat mengaji sang adik selalu ribut sendiri dengan kopiahnya yang selalu saja menghilang. Jawaban sang kakak, D yang ditandai dengan penanda lingual "*Ora*

reti. Paling didol mamak nang Mbah Sarijem,” jelas melanggar maksim kuantitas karena memberikan informasi yang berlebih-lebihan. Selain itu, tuturan sang kakak juga dapat dikatakan melanggar maksim kualitas karena telah memberikan informasi yang jelas-jelas salah. Kesalahan informasi yang dimaksud ditandai dengan penanda lingual “*Paling didol mamak nang Mbah Sarijem.”* Tuturan tersebut jelas merupakan suatu bentuk kebohongan yang sengaja dituturkan sang kakak untuk mengungkapkan kekesalannya kepada sang adik. Mustahil juga sang ibu menjual kopian anaknya kepada Mbah Sarijem yang sebenarnya nama tersebut juga fiktif. Wacana percakapan yang tergambar pada data (8) berikut juga melanggar maksim kuantitas.

- (8) F: *Getahe wes ditimbang urung, Mak? ‘Getahnya sudah ditimbang belum, Bu?’*
S: *Urung. Embuh kae kok sui timen nimbange.* ‘Belum. Entah itu kok lama sekali menimbangnya.’

Jika pada data (7), wacana percakapan cenderung melanggar dua maksim sekaligus, yakni maksim kuantitas dan maksim kualitas, maka pada data (8), percakapan hanya melanggar maksim kuantitas. Pelanggaran yang dimaksud ditandai dengan penanda lingual “*Urung. Embuh kae kok sui timen nimbange.*” Jawaban dari S atas pertanyaan yang disampaikan F jelas melanggar maksim kualitas karena cenderung berlebihan atau melampaui yang dibutuhkan oleh mitra tutur. Seharusnya, S cukup menjawab “*Urung,*” tanpa memberikan alasan lebih jauh karena hal itu tidak dibutuhkan atau belum ditanyakan oleh mitra tutur.

Pelanggaran Maksim Kualitas

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa maksim kualitas menghendaki peserta tutur memberikan informasi sesuai dengan bukti-bukti nyata. Pelanggaran terhadap maksim kualitas berarti bahwa tuturan tidak memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam maksim kualitas, yakni informasi yang dituturkan cenderung tidak didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Berikut ini contoh data wacana komunikasi keluarga yang melanggar maksim kualitas.

- (9) B: *Presiden Indonesia kloro sopo jijal? ‘Presiden Indonesia kedua siapa coba?’*
R: *Suharto.*
B: *Uduk. Pak Habibie. ‘Bukan. Pak Habibie.’*
R: *Opo iyo to? ‘Apa iya to?’*

Peristiwa tutur sebagaimana yang tampak pada data (9) terjadi di ruang tamu pada malam hari ketika anggota keluarga di salah satu rumah sedang mengobrol santai. Dalam obrolan santai tersebut, Sang Bapak, B mengajukan pertanyaan kepada anaknya tentang siapa presiden Indonesia yang kedua. Sang anak lalu dengan mantap menjawab bahwa Presiden kedua Republik Indonesia adalah Suharto. Namun, ternyata jawaban dari R disalahkan oleh B dan langsung disampaikan bahwa presiden Indonesia yang kedua adalah Habibie. Tentu saja informasi tersebut tidak benar dan menyesatkan. Namun, tujuan sang ayah, B memberikan jawaban itu semata-mata untuk menguji keyakinan sang anak terhadap jawabannya sebelumnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa terkadang pelanggaran terhadap maksim dalam prinsip kerja sama dapat dilakukan secara sengaja karena untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam berkomunikasi.

Pelanggaran Maksim Relevansi

Pada bagian yang lalu telah dikemukakan bahwa maksim relevansi mewajibkan peserta tutur memberikan kontribusi yang sesuai dengan konteks atau topik pembicaraan. Pelanggaran terhadap maksim relevansi berarti tuturan tidak memenuhi syarat-syarat yang ada di dalam maksim relevansi. Dengan kata lain, peserta tutur cenderung memberikan kontribusi yang tidak sesuai dengan topik pembicaraan. Data (10) berikut ini merupakan contoh data wacana komunikasi keluarga yang melanggar maksim relevansi.

(10) M: *Nang, mamak tukokne gulo karo teh.* ‘Nang, Ibu belikan gula dan teh.’

R: *Njih.* ‘Ya.’

M: *Ojo lali lo, gulo karo teh yo?* ‘Jangan lupa lo, gula dan the ya?’

R: *Karo jajan yo, Mak?* ‘Dengan jajan ya, Bu?’

M: *Yo. Jajane rongewu wae.* ‘Ya. Jajannya dua ribu saja.’

Peristiwa tutur yang tergambar pada data (10) terjadi pada pagi hari di sebuah keluarga berlatar petani karet. Pada data (10) terlihat bahwa M memerintah R untuk membeli gula dan teh. Jawaban pertama R yang ditandai dengan penanda lingual “*Njih,*” masih memenuhi prinsip kerja sama. Namun, pertanyaan penegasan M yang ditandai penanda lingual “*Ojo lali lo, gulo karo teh yo?*” tidak mendapatkan respon yang sesuai dari R. Penuturan R yang ditandai penanda lingual “*Karo jajan yo, Mak?*” tidak memiliki relevansi sama sekali terhadap pertanyaan penegasan yang dituturkan oleh M. Hal itu menunjukkan bahwa sebagian percakapan pada data (10) melanggar maksim relevansi.

Pelanggaran Maksim Pelaksanaan

Maksim pelaksanaan mengharuskan para peserta tutur untuk berbicara secara langsung, teratur, jelas, dan ringkas. Pelanggaran terhadap maksim pelaksanaan dapat berarti bahwa peserta tutur tidak berbicara secara langsung, tidak jelas, dan berbelit-belit. Berikut ini dikemukakan data yang melanggar maksim pelaksanaan dalam prinsip kerja sama.

(11) P: *Mak, kuncine nang ngisor kotak.* ‘Bu, kuncinya di bahwa kotak.’

S: *Kotak opo, Pak?* ‘Kotak apa, Pak?’

P: *Kotak dienggo ngangket kae. lo.* ‘Kotak yang dipakai untuk memulung (karet) itu, lo.’

Wacana komunikasi pada data (11) terjadi di sebuah perkebunan palawija milik salah satu keluarga di kelurahan Cahaya Mas. Komunikasi terjadi antara seorang suami, P dan istrinya, S. Sang suami yang membutuhkan motor untuk suatu keperluan menyuruh istrinya untuk mengambil kunci motor. Namun, tuturan yang disampaikan P tidak begitu jelas sehingga kurang dimengerti oleh S. Tuturan P yang dimaksud ditandai dengan penanda lingual “*Mak, kuncine nang ngisor kotak.*” Kata ‘kotak’ pada tuturan tersebut menimbulkan banyak makna sehingga istrinya meminta kejelasan mengenai kotak yang dimaksud sang suami dalam tuturannya. Berdasarkan keadaan tersebut, sangat terlihat bahwa percakapan yang terjadi, khususnya tuturan P melanggar maksim pelaksanaan karena kurangnya kejelasan tuturan. Pelanggaran maksim pelaksanaan dengan pola yang hampir sama juga terjadi pada wacana komunikasi antara seorang anak dan ayahnya berikut ini.

- (12) J: *Le, jikukne manuk nang njero!*
‘Nak, ambilkan burung di dalam!’
R: *La manuk seng endi?* ‘La burung yang mana?’
J: *Manuk murai batu.* ‘Burung murai batu.’
S: *Murai batu seng endi?* Lak ngomong ki seng jelas to. La wong manuke lo yo akeh. ‘Murai batu yang mana? Kalau bicara yang jelas to. Burungnya lo ya banyak.’

Wacana komunikasi yang terjadi antara seorang anak dan ayahnya sebagaimana yang terlihat pada data (12) secara jelas melanggar maksim pelaksanaan. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh tuturan yang dikemukakan oleh J yang tidak jelas sehingga membuat bingung mitra tutur. Tuturan yang melanggar maksim pelaksanaan ditandai dengan penanda lingual “*Le, jikukne manuk nang njero!*”. Tuturan tersebut masih belum jelas karena dalam konteksnya, J memiliki banyak burung yang diletakkan di dalam rumahnya. Jadi, ketika J hanya menyebutkan kata ‘burung’ secara umum, R masih kebingungan burung apa yang harus diambil. Ketidakjelasan tuturan J juga dipersoalkan oleh S yang tidak lain adalah istri J. Hal itu semakin menunjukkan bahwa tuturan J memang melanggar prinsip kerja sama khususnya pada maksim pelaksanaan.

KESIMPULAN

Dalam setiap kegiatan berkomunikasi, seseorang akan mengalami kendala-kendala tertentu. Salah satu cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kendala tersebut adalah dengan menerapkan prinsip kerja sama dalam setiap komunikasi yang dilakukan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa dalam wacana komunikasi keluarga bersuku Jawa di Kelurahan Kediri

umumnya selalu mematuhi prinsip kerja sama. Pelanggaran terhadap prinsip kerja sama juga ditemukan dalam wacana komunikasi keluarga tapi tidak mendominasi. Pelanggaran terhadap prinsip kerja sama adakalanya dilakukan secara sengaja untuk mencapai tujuan-tujuan lain dalam konteks yang lebih luas. Pematuhan maupun pelanggaran prinsip kerja sama dalam komunikasi keluarga selalu meliputi keempat maksim, yaitu maksim kualitas, maksim kuantitas, maksim relevansi, dan maksim pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsani, F. (2019). Pematuhan Dan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Dalam Komunikasi Siswa Siswi MAN 1 Surakarta. *TARLING: Journal of Language Education*, 2(2), 147-168.
- Arvianto, F. (2019). Analisis Prinsip Kerja Sama dalam Acara Komedi Extravaganza. *Jubindo: Jurnal Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(1), 54-60.
- Cahaya, N. (2013). Penerapan Prinsip Kerja Sama dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di SMA Negeri 1 Banjarmasin. *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya*, 3(1), 123-140.
- Citra, Y., & Fatmawati. (2021). Alasan Pelanggaran Prinsip Kerja Sama Grice dalam Program Mata Najwa di Trans 7. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra*, 7(2), 437-448.
- Devi, L. N., & Qomaruddin, M. (2017). Prinsip Kerja Sama dalam Bahasa Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia.com. *Haluan Sastra Budaya*, 1(1), 86-96.
- Fauziah, M. T., Emzir., & Lustiantye, N. (2018). Pelanggaran Prinsip Kerja Sama dalam tuturan Diskusi Kelas Bahasa Indonesia. *JB-BSI:*

- Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 3(2), 51-57.
- Herniti, E. (2015). Ketaatan dan Pelanggaran Iklan Televisi terhadap Prinsip Kerja Sama. *DIALEKTIKA: jurnal bahasa, sastra, dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia*, 2(2), 123-139.
- Hidayati, N. N. (2018). Pelanggaran Maksim (Floting Maxim) dalam Tuturan Tokoh Film Radio Galau FM: Sebuah Kajian Pragmatik. *Jurnal Humaniora*, 2(2), 248-263.
- Lestari, N. W. P., Sudiana, I. N., & Artika, I. W. (2019). Prinsip Kerja Sama dalam Novel Magening Karya Wayan Jengki Sunarta. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(3), 384-393.
- Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasucha, Y. (2015). *Dasar-Dasar Penelitian Bahasa, Sastra, dan Pengajaran*. Surakarta: Pustaka Brilliant.
- Putrayasa, I. B. (2014). *Pragmatik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardi, R. K. (2010). *Pragmatik: Kesantunan Imperatif Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Rusminto, N. E. (2015). *Analisis Wacana: Kajian Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sahara, M. U. (2020). Prinsip Kerja Sama Grice pada Percakapan Film. *BASINDO: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pembelajarannya*. 4(2), 222-232.
- Sari, I. P., & Juita, H. R. (2019). Prinsip Kerja Sama dalam Naskah Drama Bila Mencintai Dayang Tari Karya Benny Arnas. *Silampari Bisa: Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Indonesia, Daerah, dan Asing*, 2(1), 71-89.
- Sari, S. W., Alfiyani, C. (2021). Pelanggaran Prinsip Kerja Sama pada Komunikasi Santri Putri Pondok Pesantren Al-Fattah di Grup WhatsApp. *SALINGKA: Majalah Ilmiah Bahasa dan Sastra*, 18(1), 43-53.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wijana, I. D. P., & Rohmadi, M. (2018). *Analisis Wacana Pragmatik: Kajian Teori dan Analisis*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Winarsih, S. (2013). Prinsip Kerja Sama dalam Percakapan Berbahasa Inggris di Radio. *Paramasastra: Jurnal Ilmiah Bahasa Sastra dan Pembelajarannya*, 1(1), 120-134.